Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016
Volume 18, Nomor 3, September 2018

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

FOKUS DAN RUANG LINGKUP

Jurnal Penelitian Hukum De Jure memfokuskan pada bidang Hukum, menerima naskah karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang hukum, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain.

LEMBAGA PENERBIT

Jurnal Penelitian Hukum De Jure diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

p-ISSN 1410-5632

e-ISSN 2579-8561

Edisi jurnal elektronik tersedia pada:

http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure

INDEKSASI

Google Scholar; Indonesian Scientific Journal Database (ISJD); Indonesian Publication Index (IPI) Public Knowledge Project (PKP) Index; CiteULike; Academic Research Index (Research Bib); Zotero; Indonesia One Search; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); dan MORAREF

FREKUENSI PUBLIKASI

Terbit sebanyak empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

KETENTUAN BIAYA PUBLIKASI ARTIKEL

Setiap artikel yang disampaikan ke Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak dikenakan 'Biaya Pemrosesan Artikel'. Ini mencakup review mitra bestari, pengeditan, penerbitan, pemeliharaan dan pengarsipan, dan memungkinkan akses langsung ke versi teks lengkap dari artikel.

ALAMAT KORESPONDENSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940

Telepon 021- 2525015
Faksimili 021-2526438
Laman:
www.balitbangham.go.id

Email:
ejournaldejure@gmail.com

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indexed by:

HALAMAN KOSONG

Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

De Jure *Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*
Volume 18, Nomor 3, September 2018

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HakAsasi Manusia

Pengarah
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan HakAsasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum
Henry Donald Lbn Toruan, S.H.,M.H. (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Pemimpin Redaksi
AhyarAri Gayo, S.H.,M.H.,APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi
Marulak Pardede, S.H., M.H., APU (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)
Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)
Nevey Varida Ariani, SH., M.H, (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)
Hardianto Djanggih, S.H, M.H. (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai)
Muhaimin, S.H., (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana
Fitriyani, S.H.,M.Si.
Jaya Laksana, S.E

Sekretariat
M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P.
Asmadi, S.H

Tata Usaha
Dra. Evi Djuniarti, M.H Suwartono

Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

De Jure *Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*
Volume 18, Nomor 3, September 2018

Teknologi Informasi dan Desain Layout
Risma Sari, S.Kom.M.Si (Teknologi Informasi)
Machyudhie, S.T. (Teknologi Infornasi)
Harysandy Permana, S.Kom. (Teknologi Informasi)
Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Mitra Bestari

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
   Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
2. Prof. Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H.
   Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Prof. Dr. Tata Wijaya, S.H., M.Hum.
   Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
4. Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A.
   Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya
5. Dr. Tri Hayati, S.H., M.M.
   Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Alamat Redaksi:
Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email:
balitbangkumham@gmail.com
jurnaldejure@yahoo.com
ejournaldejure@gmail.com

Percetakan PT Pohon Cahaya
Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap di *submit* pada aplikasi *Open Jounal System (OJS)* pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure *Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*
Volume 18, Nomor 3, September 2018

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **v**
ADVERTORIAL ..... **vii**
KUMPULAN ABSTRAK ..... **ix**

Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat
(Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah)
(*Legal Protection for Title over Customary Land (Case study in the Province of Aceh in particular, the Regency of Bener Meriah)*) ..... 289 - 304
Ahyar Ari Gayo

Otonomi Khusus Di Aceh dan Papua
Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum
(*Special Autonomy in Aceh and Papua in the Middle of Corruption Phenomenon, A Law Enforcement Strategy*) ..... 305 - 318
Suharyo

Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian
(Suatu Kajian terhadap Putusan *Verstek* pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)
(*Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A review to the In-absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)*) ..... 319 - 334
Ummul Khaira dan Azhari Yahya

Diskriminasi terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur
(*Discrimination against Traditional Beliefs of Cigugur Indigenoues Community*)..... 335 - 352
Raithah Noor Sabandiah dan Endra Wijaya

Penyelesaian Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap "Kriminalisasi" Kebijakan Pejabat Publik
(*Settlement of Disparity in "Criminalized" Public Official Making and Implementing Public Policy*) ..... 353 - 366
Budi Suhariyanto

Implikasi Putusan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung
terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
(*Implication of the Decision on Material Review by the Supreme Court To the Legality of Chairman of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia*) ..... 367 - 380
Andryan

Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia
(Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System)..... 381 - 396

Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

De Jure *Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*
Volume 18, Nomor 3, September 2018

Nevey Varida Ariani

Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia
(*Existence and Effectiveness of Performance of Probate Court Duties in Indonesia*).....397 - 414
Taufik H. Simatupang

Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
(Implementasi the Narcotics Laws Viewed from the Perspective of Human Rights) ..... 415 - 432
Donny Michael

BIODATA PENULIS xix
PEDOMAN PENULISAN xxiii

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure *Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*
Volume 18, Nomor 3, September 2018
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Allah SWT, ***Jurnal Penelitian Hukum De Jure*** yang diterbitkan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** bekerjasama dengan **Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementeraian Hukum dan HAM RI** bisa kembali menerbitkan Volume 18 Nomor 3 September 2018. Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure di edisi ini memuat 9 (delapan) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil-hasil penelitian/pemikiran ilmiah para peneliti dari berbagai lembaga dan intansi penelitian. Diharapkan dari hasil penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini bisa bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi yang berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah.

Sebagaiman penerbitan-penerbitan Jurnal Penelitian hukum De Jure sebelumnya, dalam Edisi Nonmor 3 September 2018 ini, redaksi masih juga menerbitkan beberapa topik yang aktual dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Khususnya isu yang masih menjadi sorotan masyarakat adalah fenomena korupsi yang di lakukan oleh pejabat publik. Seiring perkembangan dalam masyarakat modern, Hal ini di tandai dengan permasalahan baik masalah privat mupun publik kian hari semakin banyak dan membutuhkan penyelesian yang komprehensif dan manjur dibarengi dengan issu keagamaan yang terus di gulirkan untuk menyambut pesta demokasi yang sebentar lagi akan terjadi.

Apabila diperhatikan, persolaan kebijakan yang berupa regulasi dewasa tidak sedikit yang menimbulkan dampak terhadap masyarakat misalkan peraturan KPU, tanah adat, putusan perdamian, gugatan sederhana , Pemilu dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh yudikatif mupun eksekutif harus membawa dampak kemslahatan terhadap rakyat Indonesia sebab pilar utama sebuah Negara adalah meletakkan dasar dasar kemanusian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesaia. Namun banyak sekali tindakan yang dapat merugikan rakyat apalagi tindakan pidana yang mengancam sendi- sendi kehidupan kenegaraan seperti Narkoba, korupsi, Kriminlisasi kebijakan yang tidak jarang menelan korban baik secara langsung mupun tidak langsung yang dapat mengahambat kemajuan bangsa. Dorongan dari dalam diri sendiri dan rangsangan dari luar harus segera diatasi untuk mencapai tujun Negara kita yaitu mencipkan masyarakat yang sejahterah adil dan makmur.

Memperhatikan hal- hal tersebut di atas, maka untuk memberantas korupsi dan memperbaiki moraritas bangsa yang telah menggurita di Republik yang tercintai menjadi hal yang utama karena telah menghinggapi diberbagai kalangan, baik pegawai pemerintah, swasta, anggota-anggota legislatif di pusat dan di daerah serta aparat penegak hukum, sehingga untuk penyelesaiannya dibutuhkan keadilan politik yaitu keadilan bagi seluruh warga Negara.

Di samping persoalan hak tanah adat, dalam terbitan ini juga kami terbitkan berkaitan dengan Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum, Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap "Kriminalisasi" Kebijakan Pejabat Publik, Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada ***Jurnal Penelitian Hukum De Jure*** untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** dan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** yang telah berkenan dalam penerbitan ***Jurnal Penelitian Hukum De Jure*** ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Mitra Bestari, yang telah melakukan *review* atas semua tulisan yang diterbitkan pada edisi ini.

Jakarta, September 2018

Redaksi

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure *Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*
Volume 18, Nomor 3, September 2018

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

HALAMAN KOSONG

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ahyar Ari Gayo (Law Research and Development Center, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Legal Protection for Title over Customary Land (Case study in the Province of Aceh in particular, the Regency of Bener Meriah)

Law Research Journal De Jure, 2018 September, Volume 18, Number 3, Page 289 - 304

Bener Meriah Regency is a regency resulted from the split of Aceh Tengah Regency. Bener Meriah Regency possesses titles over lands used collectively by its its indiigenous people for collective benefits such as, the upper stream section of rivers used for daily needs of watering the paddy fields and plantation, drinking water, and farming. In a line with the population growth, more people are requiring lands for their livelihood, causing many lands that were used for people benefits are acquired for individuals' interests. Consequently, this research is required to identify the Recognition to the Existence of Community of Customary Law and legal protection for Title over Customary Land at Bener Meriah Regency. This research is an empirical legal research using qualitative approach. With such type and approach of research, the researcher collects data and information by means of interviews with the the Head of Customary Board, the Head of Bale Atu Village, the Head of Legal Department of the Administration of Bener Meriah Regency and Some Public Figures to find the answers of the research's quests for further analysis. The result of this research finds that at Bener Meriah Regency, firstly, the people still recognize the existences of Customary Institutions as the institutions regulating the lives of the communities, This has been proved by the issuance of Islamic Canon (Qanun) No. 08 of 2009 regarding the Administration of Mukim, a subdivision of the administration below the district and oversees some kampongs. Secondly, the existence of customary lands as collective lands is still practiced and protected in particulars the customary lands used for perueren (farming), as proved by the issuance of Qanun No. 05 of 2011 regarding Uber-Uber and Blang Paku Farms (Peruweren) Location.

Keywords: Title over Customary Land

Suharyo (*Law Research and Development Center, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights*)

Special Autonomy in Aceh and Papua in the Middle of Corruption Phenomenon, A Law Enforcement Strategy

Law Research Journal De Jure, 2018 September, Volume 18, Number 3, Page 305 - 318

Special Autonomy in Aceh and Papua, is a form of asymmetrical decentralization, as a middle road to realize the public prosperity, in settling armed conflicts demanding separation from the independent Unitary State. The implementation of special autonomy is based on the Law No. 18 of 2001 regarding Special Autonomy For the Special Region of Aceh as the Province of Nangroe Aceh Darussalam, and the Law No. 18 of 2001 Regarding Special Autonomy for the Province of Papua. The implementation of special autonomy in Aceh, cannot operate as expected before. Hard reaction rejecting special autonomy came from the armed movement of Gerakan Aceh Merdeka (GAM). However due to the national disaster of Tsunami in December 2004, and total destruction of Banda Aceh, Meulaboh and surrounding areas, with death tolls of reaching more than 112.000, and by the government transparency policies, an MOU was signed in Helsinki, Finland, leading to the issuance of the Law No. 11 of 2006 Regarding the Administration of Aceh. While the subjects of this research are the issues in the background of corruption cases in Aceh and Papua, and the strategy of combating the same. The method employed in this research is juridical normative method. During the development of the Province of Papua, a new province has been established by the Law No. 35 of 2008 Regarding Establishment of the Province of West Papua. Ironically, the endeavors to make the special autonomy success, both in Aceh and in Papua, have given a raise to the corruption cases. Until now, the efforts in combating the corruptions by the law enforcers, i.e. the Police, Public Prosecutors, and KPK, tend to be ineffective. For such purpose, more repressive actions in combating the corruption are required.

Keywords: Special Autonomy, Aceh, Papua, Corruption and Law Enforcement

Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

De Jure *Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*
Volume 18, Nomor 3, September 2018

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ummul Khaira, Azhari Yahya (*Faculty of Law, Syiah Kuala University*)

Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A review to the In-absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)

Law Research Journal De Jure, 2018 September, Volume 18, Number 3, Page 319 - 334

Article 39 clause (1) of the Law No. 1 of 1974 regarding Marriage connected with Article 31 of the Government Regulation No. 9 of 1975 regarding Implementation of the Law No. 1 of 1974 connected with Article 65 and Article 82 of the Law No. 7 of 1989 regarding Religious Justice System connected with Article 115 of the President Instruction No. 1 of 1991 regarding Dissemination of Islamic Law Compilation provide for that the judges must attempt to reconcile the parties on each proceeding effectively and optimally to prevent the divorce. However in practices, the attempts have not been optimum rendering the number of the divorce to consistently rise, in particulars, the divorce decision in the absence of a party. This research is aimed to identify the attempt to reconcile the parties in a Divorce Lawsuit at The Shariah Court of Bireuen and the causes of the failure to reconcile which in turn leads to the issuance of in-absentia decision. The method of this research is juridical empirical. The research demonstrates that reconciliation efforts at the Shariah Court of Bireuen have not been effective and optimum to prevent the divorce in particulars in the proceedings in which one of the parties is absent. This is due to the performance of the judges that has not been effective in attempting to reconcile the parties at the court. In addition, the intentional absence of a party, for the purpose of facilitating easy proceedings of the divorce law suit and the strong intention of the parties to divorce have made the reconciliation are hard to reach, which in turn have made the judges issues the in-absentia decisions of divorce.

Keywords: Reconciliation Effort, Divorce Lawsuit, In-absentia Decision

Raithah Noor Sabandiah, Endra Wijaya (Faculty of Law, Pancasila University)

Discrimination against Traditional Beliefs of Cigugur Community of Customary Law

Law Research Journal De Jure, 2018 September, Volume 18, Number 3, Page 335 - 352

One of the characteristics of a Community of Customary Law is magically religious. The characteristic of magically religious is present in the Cigugur Community of Customary Law, one of them is, in the form of Javanese-Sundanese Teachings. Despite the fact that Javanese-Sundanese Teachings have been present since a long time, their existence has never been free from discrimination. The forms of discriminations suffered by the followers of Javanese-Sundanese Teachings in Cigugur, among others, from the prohibitions of religious activities of Javanese-Sundanese Teachings, systematic persecution forcing the followers to convert to the religions recognized by the state, and to the physical abuse. The discrimination has been due to some issues, such as the forms of intervention of state laws and the issue of legal recognition to the existence of the community. This research uses non-doctrinal legal research method. The data are collected by literature study, observation, and interviews with come relevant sources.

Keywords: Traditional Beliefs, Discrimination, Recognition

Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

De Jure *Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*
Volume 18, Nomor 3, September 2018

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Budi Suhariyanto (Law and Justice Research and Development Center, the Supreme Court of the Republic of Indonesia.)

Settlement of Disparity in "Criminalized" Public Official Making and Implementing Public Policy

Law Research Journal De Jure, 2018 September, Volume 18, Number 3, Page 353 - 366

This article is aimed to discuss the method of settlement of disparity in criminalization cases of public official making and implementing public policies. Basically, public officials should be accountable only under the administrative laws, however in reality, the law enforcers have charged some public officials making and implementing public policies under criminal laws. Based on such facts, it is interesting to question some issues such as what are the "contact points" in charging the public officials whether under the administrative laws and criminal laws? and how far is the criminalization practices against the public officials making and implementing public policies in Indonesia? And why a method of settlement of the disparity is required? The discussion finds that there are some conceptual contact points related to the criminalization practices of the public officials making and implementing public policies (that may inflict losses to the state finance) both from normative and doctrinal aspects. In practices, the criminal judges have multi-interpretations in deciding whether to convict, release or dimiss the relevant public officials from all charges. To minimize the legal uncertainty due to the disparity, the President Instruction No. 1 of 2016 is issued to provide guidelines for the Police and Public Prosecutor to firstly apply the administrative laws before commencing any criminal investigation against the authorities (policies) misuse cases pursuant to the Law No. 30 of 2014. Since a President Instruction is not an instrument of legislations, its binding power has not been so strong, hence it is necessary to escalate its status into a President Regulation. In addition, to strengthen the solution in such disparity settlement it is also necessary for the Supreme Court to make the guideline for the judges in handling the criminal cases against public officials making and implementing public policies.

Keywords: Criminal Charges, Criminalization, Public Officials, Public Policies

Andryan (Faculty of Law, Muhammadiyah University, North Sumatra)

Implication of the Decision on Material Review by the Supreme Court To the Legality of Chairman of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia

Law Research Journal De Jure, 2018 September, Volume 18, Number 3, Page 367 - 380

The Supreme Court has the power vested on it under Article 24A Clause (1) 1945' Constitution to conduct material test on the regulations issued under such laws. This article describes the issue of the Legality of the Chairman of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia following the Decision on Material Review by the Supreme Court No. 20P/HUM/2017 on the Regulation of the Regional Representative Council No. 1 of 2017 regarding Code of Conduct. Theoretically, this research is expected to contribute ideas to the development of the rights of material review and the nature of the decision. This research is a legal research using juridical normative method. The approaches used in this research include the statute approach, conceptual approach and case approach. While the conclusion of this research, the implication of the appointment of the Chairman of the Regional Representative Council following the Decision on Material Review by the Supreme Court No. 20P/HUM/2017, is that legally the election of "new' chairman for a term of office of 2.5 year conducted based on the revoked regulation can be classified as an illegal move or act against the law. The consequences is, the action should not be recognized as legal by the law and should be declared null and void by the operation of the laws.

Keywords: Implication of Decision, Material Review, Legality

Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

De Jure *Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*
Volume 18, Nomor 3, September 2018

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Nevey Varida Ariani (Law Research and Development Center, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System

Law Research Journal De Jure, 2018 September, Volume 18, Number 3, Page 381 - 396

The courts must not only be independent and of integrity, but must also be able to provide fair and just services to all people. For such purpose, the Indonesian Justice System should adopt the principles of simple, quick and cost effective. The issue of this research is the administration of justice to the Small Claim Lawsuit and its barriers in the Indonesian Justice System by using qualitative research method. The research recommends it is necessary to revise the Regulation of Supreme Court No. 2 of 2015 regarding Small Claim Lawsuit by raising the limit of claim amount from Rp 200 million to Rp 500 million or by observing the reliable regional economic value by observing the highest amount of income in each regions so that it may accommodate and extend more amounts of claim. The cases may be decided by means of special justice system as provided for in the applicable laws and regulations or any disputes related to title over land, or those whose proceedings have been prevented by the other laws and regulations and should be reviewed (Intellectual Property, Industrial Relations, Shariah Economy, etc.) if the settlement can be made more simply, then it should need no limit. The proceedings of Small Claim Lawsuit, as the center of the case, still use the proceedings regulated under regular lawsuits. Therefore it is necessary to include the revised contents of the Small Claim Lawsuit procedural regulations in the Draft of the Indonesian Civil Code, not only to include the same in the Regulation of Supreme Court, but to bind all parties in the Laws. Meanwhile, it is also necessary to socialize the Regulation of the Supreme Court No. 2 of 2015 to the judges, clerks, acting clerks, lawyers/ advocates and in particulars to the public.

Keywords: Small Claim Lawsuit, Justice System, Laws

Taufi H. Simatupang (*Policy Research and Development Center, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights*)

Existence and Effectiveness of Performance of Probate Court Duties in Indonesia

Law Research Journal De Jure, 2018 September, Volume 18, Number 3, Page 397 - 414

Probate Court (Balai Harta Peninggalan) is a technical implementation unit of the government agencies which structurally is under the Directorate of Civil Cases, the Directorate of Public Legal Administration, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The position of Probate Court is very important in Indonesian judicial system but yet only few people recognize its existence. The issue of this research is the effectiveness and efficiency of performance of Probate Court duties and the perceptions of law enforcers. The method used in this research is juridical sociological, employing primary and secondary data collected by literature study and data collection in the field, which further analyzed using inter-disciplinary approach. The research demonstrates that Probate Court's duties are based on the determinations of the District Court, reports of the Population Affairs and Civil Registry Office and Notary deeds. Which means the performance of the duties is highly dependent to the related agencies. As an institution mentioned many times in the Indonesian Civil Code, the Probate Court is significantly needed until now. In particulars, its position as a receiver in the bankruptcy and moratorium (suspension of debt payment obligation) issues. The Ministry of Law and Human Rights needs to immediately encourage the signing of the draft of Probate Court Laws, regular socialization and by inviting relevant agencies to further introduce the Probate Court and its duties.

Keywords: Existence, Effectiveness, Probate Court, Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

De Jure *Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*
Volume 18, Nomor 3, September 2018

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Donny Michael (*Human Rights Research and Development Center, The Agency of Research and Development* of Law *and Human Right*s)

Implementation of The Narcotics Law Reviewed from Human Rights Perspective

Law Research Journal De Jure, 2018 September, Volume 18, Number 3, Page 415 - 432

Narcotic is one of the crimes whose graphic demonstrates consistent escalation. Almost elements in the society, without discriminating their social status are prone to penetration by narcotics, such as children, students, college students, celebrities, professionals and even the state officials. Narcotics are one of the forms of consensual crimes. Narcotics-related crimes will of course require intervention of the government. Article 28I clause (1) of the 1945' Constitution of the Republic of Indonesia provides for that the state, in particular the government, shall be responsible for the protection, advancement, enforcement, and fulfillment of Human Rights. Despite the fact that Human Rights may be violated by any one or group, but according to the international laws of Human Rights, a country shall not intentionally ignore the human basic rights and freedom. The formulation of the problems raised in this research is the implementation of the Law No. 35 of 2009 regarding Narcotics viewed from the perspective of Human Rights. While the aim of this research is to identify how far the implementation of the Law No. 35 of 2009 regarding Narcotics has been from the perspective of Human Rights. This research is descriptive-analysis by using qualitative approach. Data are collected by means of in-depth interviews, documentation, and observation. Informants are selected by means of purposive sampling. This research recommends that we need an accord on the definitions of addicts, abuser, and victim of narcotic abuse, therefore we will not mistake in defining and positioning the three legal subjects within the contexts of narcotics law enforcement, including the definition of rehabilition which will have significant influence to the possible placement of somebody in a rehabilitation institution. Further, it is also necessary to clearly define and mark off the authorities of the National Narcotics Agency and the Police of the Republic of Indonesia in handling and combating Narcotics-related cases; it is also necessary to insert / draft special chapter for children involved in narcotic abuse since the current Narcotics Laws have no detailed regulation on the children involved in narcotic abuse

Keywords: Implementation, Narcotics Laws, Human Rights

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Ahyar Ari Gayo (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 3, September 2018, Halaman 289 - 304

Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaen Aceh Tengah,. Kabupaten Bener Meriah memiliki hak atas tanah yang diamnfaatkan bersama oleh masyarakat adatnya untuk untuk keperluan bersama seperti hulu air sebagai kerperluan sehari-hari dalam mengairi sawah ladang, air minum, dan tanah wilayah peternakan. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk semakin besar pula masyarakat membutuhkan tanah untuk kehidupanya, sehingga banyak lahan-lahan untuk kepentingan bersama diambil alih untuk kepentingan indevidual. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengakuan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan bagaimana perlindung hukum Hak Atas Tanah Adat di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif.Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dengan Ketua Lembaga Adat, Kepala Desa Bale Atu, Kepala Bagain Hukum Pemerintah Tingkat II Bener Meriah dan Beberapa Tokoh Masyarakat untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitian yang selanjutnya dilakukan analisis. Hasil penelitian ini menemukan hasil bahwa di Kabupaten Bener Meriah Pertama, masyarakat masih mengakui keberadaan Lembaga-lembaga Adat sebagai lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat, ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Qanun Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim. Kedua, keberadaan tanah adat sebagai tanah persekutuan masih cukup dikenal dan dilindungi terutama tanah adat diperuntukan untuk perueren (pertenakan), ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Qanun Nomor 05 tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber dan Blang Paku.

Kata Kunci: Hak Tanah Adat

Suharyo (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 3, September 2018, Halaman 305 - 318

Otonomi khusus di Aceh dan Papua, merupakan suatu desentralisasi asimetrik, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam menyelesaian konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Negara Kesatuan yang merdeka. Penerapan otonomi khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemberlakuan otonomi khusus di Aceh, tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Reaksi keras menolak otonomi khusus dilakukan oleh gerakan perlawanan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun berkenaan adanya bencana nasional Tsunami Desember 2004, dengan kehancuran Banda Aceh total, Meulaboh dan daerah sekitarnya, dengan korban tewas mencapai lebih dari 112.000 jiwa, dan dengan keterbukaan pemerintah, akhirnya tercapai MOU Helsinki Finlandia, yang berujung dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi fenomena korupsi di Aceh dan Papua, dan bagaimana strategi penindakannya. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif. Dalam perkembangan di Provinsi Papua, dibentuk provinsi baru melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat. Ironisnya upaya mensukseskan otonomi khusus tersebut, baik di Aceh maupun di Papua, justru terjadi fenomena korupsi. Sampai sekarang, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh jajaran penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan, maupun KPK, cenderung kurang maksimal Untuk itu sangat diperlukan strategi penindakan dengan langkah yang represif.

Kata Kunci: Otonomi Khusus Aceh, Papua, Korupsi dan Penindakan Hukum

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Ummul Khaira, Azhari Yahya (Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala)

Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 3, September 2018, Halaman 319 - 334

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam menyatakan hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak pada setiap persidangan secara efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian. Namun pada praktiknya, upaya tersebut masih belum dilakukan secara maksimal sehingga perkara perceraian terus menerus meningkat terutama putusan verstek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen serta penyebab tidak tercapainya perdamaian sehingga diputus secara verstek. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya perdamaian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen belum efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian terutama dalam perkara verstek. Hal ini disebabkan oleh kinerja hakim yang belum maksimal dalam mengupayakan perdamaian di setiap persidangan. Selain itu, ketidakhadiran salah satu pihak dengan maksud untuk mempermudah proses perceraian serta telah adanya keinginan dari para pihak untuk bercerai menjadi penyebab perdamaian semakin sulit dicapai, sehingga pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan perceraian secara verstek.

Kata Kunci: Upaya Perdamaian, Perkara Perceraian, Putusan Verstek.

Raithah Noor Sabandiah, Endra Wijaya (Fakultas Hukum Universitas Pancasila)

Diskriminasi Terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 3, September 2018, Halaman 335 - 352

Salah satu corak dari masyarakat hukum adat ialah bersifat magis religius. Sifat magis religius yang ada pada masyarakat hukum adat Cigugur, salah satunya, berwujud Ajaran Djawa Sunda. Walaupun Ajaran Djawa Sunda sudah sejak lama hadir, tapi keberadaannya tidak luput dari diskriminasi. Bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh para pemeluk Ajaran Djawa Sunda di Cigugur, antara lain, mulai dari pelarangan beberapa aktivitas keagamaan Ajaran Djawa Sunda, pengondisian secara sistematis agar para pemeluknya berpindah ke agama yang diakui oleh negara, bahkan sampai ke tindakan pelecehan secara fisik. Diskriminasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya bentuk-bentuk intervensi dari hukum negara dan persoalan pengakuan secara yuridis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nondoktrinal. Data yang digunakan diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, pengamatan, dan wawancara kepada beberapa narasumber yang relevan.

Kata Kunci: Agama Tradisional, Diskriminasi, Pengakuan

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Budi Suhariyanto (Pusat Penelitian dan Pengembangan Peradilan, Mahkamah Agung R.I.)

Penyelesaian Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap "Kriminalisasi" Kebijakan Pejabat Publik

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 3, September 2018, Halaman 353 - 366

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang cara penyelesaian disparitas pemidanaan terhadap kriminalisasi kebijakan pejabat publik. Pada dasarnya ranah pertanggungjawaban kebijakan pejabat publik identik dengan hukum administrasi, tetapi pada kenyataannya aparat penegak hukum melakukan proses pemidanaan terhadap pejabat publik pemilik kebijakan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, menarik dipermasalahkan beberapa hal yaitu: apa yang menjadi persinggungan kriminalisasi kebijakan pejabat publik menurut hukum administrasi dan hukum pidana? dan bagaimanakah praktik pemidanaan terhadap kriminalisasi kebijakan pejabat publik di Indonesia? serta mengapa diperlukan penyelesaian disparitas pemidanaan terhadap kriminalisasi kebijakan pejabat publik? Hasil pembahasan mengemukakan bahwa terdapat titik singgung konseptual terkait kriminalisasi pejabat pembuat dan pelaksana kebijakan (yang berakibat merugikan keuangan negara) baik secara normatif maupun doktrin. Pada praktiknya, para hakim peradilan pidana memiliki ragam tafsir dalam hal memutus penghukuman dan pembebasan serta pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap pejabat publik yang bersangkutan. Untuk meminimalisir ketidakpastian hukum akibat disparitas pemidanaan tersebut maka diterbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 untuk mengarahkan Kepolisian dan Kejaksaan agar sebelum melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan wewenang (kebijakan) agar mendahulukan proses hukum administrasi pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Sehubungan kedudukan Inpres yang notabene bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan maka daya ikatnya kurang kuat sehingga perlu dinaikkan statusnya menjadi sebuah Perpres. Selain itu untuk memperkuat solusi penyelesaian disparitas tersebut maka diperlukan juga penyusunan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung yang diperuntukkan bagi para hakim yang menangani perkara kriminalisasi kebijakan pejabat publik.

Kata Kunci: Pemidanaan, Kriminalisasi Kebijakan, Pejabat Publik

Andryan (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, September 2018, Halaman 367 - 380

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yang ditegaskan dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, yakni menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Tulisan ini menguraikan permasalahan terhadap legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017 terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib. Dalam tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Hak Uji Materil terhadap serta sifat putusannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yakni Implikasi Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017, bahwa secara hukum, tindakan pemilihan pimpinan "baru" versi jabatan 2,5 tahun itu tetap dilakukan berdasarkan peraturan yang telah dibatalkan, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan ilegal atau tindakan yang berlawanan dengan hukum. Konsekuensinya, tindakan tersebut menjadi tidak sah secara hukum dan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Kata Kunci: Implikasi Putusan, Hak Uji Materi, Legalitas

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Nevey Varida Ariani (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, September 2018, Halaman 381 - 396

Pengadilan bukan hanya harus independen dan berintegritas, namun harus mampu memberikan layanan berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat. Untuk itu, dalam Sistem Peradilan di Indonesia berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya murah. Permasalan Penelitian ini yaitu Penerapan Gugatan Sederhana dan hambatannya dalam Sistem Peradilan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasi penelitian merekomendasikn Perlu revisi Perma No. 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana yaitu Menaikan nilai gugatan materil dari Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta atau berdasarkan nilai ekonomi Daerah yang mengacu pada nilai pendapatan tertinggi di daerah yang dapat mengakomodir dan memperluas jumlah gugatan. Perkara penyelesaian sengketanya dilakukan melalui peradilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah menghambat proses menjadi hal yang gugatan perlu ditinjau ulang (HKI, Hubungan Industrial, Ekonomi Syariah, dan lain-lain) jika penyelesaiannya dapat secara sederhana sehingga tidak perlu lagi dibatasi. Ekseksusi gugatan sederhana sebagai makhkota dari gugatan masih menggunakan eksekusi dalam gugatan biasa. Memasukan materi muatan gugatan sederhana yang telah direvisi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tidak hanya dalam perma namun mengikat dalam Undang-undang. Sosialisasi Perma No. 2 Tahun 2015 kepada hakim, panitera, panitera pengganti, pengacara/ advokat terutama kepada masyarakat sangat diperlukan

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Peradilan, Hukum

Taufik H. Simatupang (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 3, September 2018, Halaman 397 - 414

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksanaan teknis instansi pemerintah yang secara sruktural berada di bawah Direktorat Perdata Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kedudukan Balai Harta Peninggalan sangat penting dalam sistem hukum keperdataan Indonesia tetapi belum dikenal masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan dan bagaimana persepsi penegak hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, memakai data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur dan pengumpulan data lapangan, kemudian dianalisis dengan pendekatan interdisipliner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas Balai Harta Peninggalan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Notaris. Artinya pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sangat bergantung kepada instansi terkait. Sebagai institusi yang banyak disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Balai Harta Peninggalan masih sangat diperlukan sampai saat ini. Terutama kedudukan sebagai kurator dalam masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu segera mendorong disahkannya Rancangan Undang-undang Balai Harta Peninggalan, sosialisasi secara berkala dan mengundang instansi terkait untuk lebih memperkenalkan Balai Harta Peninggalan dan tugas-tugasnya.

Kata Kunci: Eksistensi, Efektivitas, Balai Harta Peninggalan, Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure ***Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016***
Volume 18, Nomor 3, September 2018

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Donny Michael (Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018, Halaman 415 - 432

Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh Narkotika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat. Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*concensual crimes*). Penanganan Tindak Pidana Narkotika tentu perlu campur tangan dari pemerintah. Di dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Meskipun pada prinsipnya hak asasi manusia dapat dilanggar oleh setiap orang atau kelompok, namun berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak dan kebebasan manusia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini bersifat dekriptif-analisis dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu ada harmonisasi mengenai definisi pecandu, penyalahguna, serta korban penyalahgunaan narkotika, sehingga di dalam mendefinisikan dan menempatkan ketiga subjek hukum dalam konteks penegakan hukum narkotika tidak salah sasaran, serta penempatan rehabilitasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemungkinan ditempatkannya seseorang di lembaga rehabilitasi. Kemudian, perlu diperjelas dan dipertegas antara kewenangan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penanganan dan pemberatasan Narkotika; serta perlu ditambahkan/disusun bab khusus untuk Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika karena di dalam Undang-Undang Narkotika saat ini tidak ada dijelaskan lebih rinci bagaimana pengaturan tentang anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Narkotika, Hak Asasi Manusia